

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 November 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARWANTO
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 226504

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 860.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m²/45 m² di KAB / KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 449 m²/70 m² di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 240.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC LX Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 211.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.390.000.000**III. HUTANG** Rp. 650.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 740.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.